



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**

*Terakreditasi A*

*SK BAN-PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019*

**Konflik dan Resolusi Konflik: Studi Kasus Genosida**  
**Terhadap Suku Tutsi di Rwanda**

Skripsi

Oleh

Ni Putu Gita Puteri Sugiarsa

2017330148

Bandung

2021



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**

*Terakreditasi A*

*SK BAN-PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019*

**Konflik dan Resolusi Konflik: Studi Kasus Genosida**  
**Terhadap Suku Tutsi di Rwanda**

Skripsi

Oleh

Ni Putu Gita Puteri Sugiarsa


2017330148


Pembimbing

I Nyoman Sudira

Bandung

2021

 The linked image cannot be displayed. The file may have been moved, renamed, or deleted. Verify that the link points to the correct file and location.

 The linked image cannot be displayed. The file may have been moved, renamed, or deleted. Verify that the link points to the correct file and location.

## ABSTRAK

Nama : Ni Putu Gita Puteri Sugiwarsha

NPM : 2017330148

Judul : Konflik dan Resolusi Konflik: Studi Kasus Genosida Terhadap Suku Tutsi di Rwanda

---

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana proses resolusi konflik antara komunitas suku Tutsi dan Hutu oleh UNAMIR dengan adanya ancaman genosida. Pergesekan antara kedua kelompok masyarakat yaitu suku Hutu dan suku Tutsi yang kemudian pecah menjadi aksi genosida ini sudah terjadi selama beberapa dekade sebelumnya dan diperburuk oleh sistem kolonialisme yang ditetapkan oleh Belgia. Setelah Rwanda mendapat kemerdekaan sebagai suatu negara yang berdaulat, permasalahan antar etnis ini tetap saja terjadi sampai pada akhirnya pada tahun 1990, genosida terhadap suku Tutsi terjadi. Isu yang mengancam keberlangsungan hidup dari suku Tutsi ini kemudian dianalisis menggunakan teori resolusi konflik.

Dalam teori resolusi konflik ini ada tiga poin utama yang dibahas oleh Peter Wallensteen dalam bukunya yaitu "*Understanding Conflict Resolution*" yang bisa menjelaskan lebih lanjut bagaimana proses resolusi konflik antara komunitas suku Hutu dan Tutsi oleh Pemerintah Rwanda dengan adanya ancaman genosida.

Kata kunci: Resolusi Konflik, Rwanda, UNAMIR

**ABSTRACT**

Nama : Ni Putu Gita Puteri Sugiarsa

NPM : 2017330148

Judul : *Conflict and Conflict Resolution: A Case Study of the Genocide Against the Tutsis in Rwanda*

---

*The conflict that occurred in Rwanda between the Hutu and Tutsi tribes that broke out into acts of genocide is an important case study of conflict resolution that needs further investigation. This study aims to analyze in depth the process of conflict resolution of the Tutsi tribal community by the Government of Rwanda with the threat of genocide. The friction between the two groups of people had occurred in the previous decades and was exacerbated by the colonial system established by Belgium. After Rwanda gained independence as a sovereign Country, this inter-ethnic problem persisted until finally in 1990, the genocide against the Tutsis occurred. The issue that threatens the survival of the Tutsi tribe is then analyzed using the conflict resolution theory.*

*In this conflict resolution theory, there are three main points discussed by Peter Wallensteen in his book, namely "Understanding Conflict Resolution" which can explain further how the process of conflict resolution of the Tutsi tribal community by the Government of Rwanda with the threat of genocide.*

*Keyword: Conflict Resolution, Rwanda, UNAMIR*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas segala limpahan berkat serta rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Konflik dan Resolusi Konflik: Studi Kasus Genosida Terhadap Suku Tutsi di Rwanda ”. Penyelesaian penelitian ini merupakan salah satu dari pemenuhan syarat tugas akhir untuk mencapai gelar akademi Strata-1 (S1) Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Dr. I Nyoman Sudira yang selama kurang lebih setahun terakhir telah membantu penulis dalam membimbing penyusunan skripsi dari mulai proposal skripsi. Tidak lupa penulis juga ucapkan mohon maaf bila terdapat keterbatasan serta kekurangan dalam skripsi ini baik dari segi penulisan hingga analisis yang dipaparkan. Akhir kata semoga penulisan penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Bandung, 8 Juli 2021



Ni Putu Gita Puteri Sugiarsa

## UCAPAN TERIMAKASIH

Penelitian ini saya persembahkan untuk mereka yang akan saya sebutkan di bawah ini yang dukungan serta doa tidak luput dari perhatian saya selama proses penyusunan penelitian ini:

1. Ucapan terima kasih serta puji dan syukur saya panjatkan ke hadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas asungkerta wara nugraha-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
2. Kepada kedua orang tua saya dan adik saya yang sangat saya cintai dan hormati I Ketut Sugiarsa, Ni Luh Putu Diah Lestari dan I Made Genta Raharja Sugiarsa terima kasih atas semua dukungan, kasih sayang, dan doanya yang senantiasa selalu menyertai kakak.
3. Kepada dosen pembimbing saya sendiri, Dr. I Nyoman Sudira terima kasih atas saran, masukan, humor serta motivasi yang diberikan selama penyusunan penelitian ini.
4. Untuk Rakha Octaviano dan Aldi Dwi Putra Wijaya sahabat saya dari kecil yang selalu ada untuk saya dan menghibur dari tk hingga kuliah dan kedua sepupu saya Ni Luh Putu Trisanti dan Komang Ayudia Wagiswari Antara yang juga selalu hadir dalam semua peristiwa penting di hidup saya termasuk tugas akhir ini.
5. Terakhir kepada 19 orang ini yang sudah mewarnai kehidupan perkuliahan saya selama 4 tahun terakhir, Balqis, Ranti, Eja, Kimi, Egin, Tari, Ivan, Iki, Rahma, Inez, Flo, Mimi, Bella, Efraim, Oci, Sonia, Gea, Bam, dan Maura.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL.....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB 1: PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang Masalah.....</b>	<b>1-4</b>
<b>1.2 Identifikasi Masalah.....</b>	<b>4-7</b>
1.2.1 Pembatasan Masalah.....	8
1.2.2 Perumusan Masalah.....	8
<b>1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....</b>	<b>8-9</b>
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	9
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	9
<b>1.4 Kajian Literatur.....</b>	<b>9-13</b>
<b>1.5 Kerangka Pemikiran.....</b>	<b>14-22</b>
<b>1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data.....</b>	<b>22-24</b>
1.6.1 Metode Penelitian.....	22
1.6.2 Teknik Pengumpulan Data.....	23-24
<b>1.7 Sistematika Pembahasan.....</b>	<b>24-25</b>
<b>BAB 2: GAMBARAN UMUM KONFLIK ANTAR ETNIS DI RWANDA YANG BERUJUNG PADA AKSI GENOSIDA</b>	
<b>2.1 Komunitas yang bersengketa antara suku Hutu dan Tutsi di Rwanda.....</b>	<b>28-33</b>
<b>2.2 Konflik internal antara suku Hutu dan Tutsi.....</b>	<b>33-39</b>

2.3 Eskalasi konflik antar suku Hutu dan Tutsi.....	39-42
2.4 Keterlibatan RPF sebagai kelompok pemberontak di Rwanda yang mengancam komunitas di Rwanda.....	42-46
<b>BAB 3: PROSES RESOLUSI KONFLIK OLEH PEMERINTAH RWANDA TAHUN 1990-1994</b>	
3.1 <i>Arusha Accords</i> Sebagai Resolusi Perdamaian Untuk Mengakhiri Genosida.....	57-62
3.2 Mandat DK PBB Berupa Implementasi UNAMIR Dalam Menjalankan Misi Perdamaian di Rwanda.....	62-70
<b>BAB 4: KESIMPULAN.....</b>	<b>71-73</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>74-77</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Rwanda menjadi sebuah negara yang merdeka serta berdaulat pada tahun 1962 setelah Jerman dan Belgia menjadikan Rwanda sebagai salah satu negara koloni mereka dari rentan waktu 1884-1962.<sup>1</sup> Namun, kata merdeka jauh dari fakta saat itu dengan munculnya perang sipil antara dua kelompok etnis mayoritas di Rwanda yaitu Hutu dan Tutsi. Rwanda merupakan sebuah negara dengan masyarakat yang dibagi ke dalam tiga kelompok etnis yaitu, Hutu (84%), Tutsi (15%), dan Twa (1%).<sup>2</sup> Kedua suku mayoritas di Rwanda yakni Hutu dan Tutsi memiliki karakteristik yang kurang lebih sama dan memungkinkan adanya pembauran budaya antara kedua suku tersebut, namun Belgia memanfaatkan sistem rasisme yang dikenal sebagai *ethnogenesis*. Sejarah mengenai suatu suku etnis di Afrika sering dipolitisasi dan menjadi salah satu instrumen propaganda yang sering ditemukan di tengah-tengah konflik antar etnis.

Dalam *ethnogenesis* disebutkan bahwa seorang individu berdasarkan sejarah kelompok etnisnya memiliki hak lebih tinggi dari kelompok etnis lainnya.<sup>3</sup> Hal ini menanamkan pola pikir bahwa adanya ras-ras tertentu yang berada di kelas-

---

<sup>1</sup> United Nations, Rwanda - UNAMIR Background, "*Historical Background*", <https://peacekeeping.un.org/en/mission/past/unamirFT.htm> (diakses pada 15 September 2020)

<sup>2</sup> United Nations, Rwanda - UNAMIR Background, "*United Nations Involvement*", <https://peacekeeping.un.org/en/mission/past/unamirFT.htm> (diakses pada 15 September 2020)

<sup>3</sup> Arutiunov, S. (1994). *Ethnogenesis: its forms and rules. Anthropology & archeology of Eurasia*, 33(1), 79-93.

kelas sosial tertentu dengan orang kulit putih berada di kelas sosial paling atas. Belgia memanfaatkan aturan sosial yang sudah ada ini melalui sistem administrasi negara dengan mengadakan kartu identitas yang menyebutkan bahwa apakah satu individu itu berasal dari suku Hutu ataupun Tutsi.<sup>4</sup> Sistem kartu yang berjalan selama lebih dari 60 tahun inilah yang pada akhirnya menyebabkan kesenjangan sosial serta perselisihan di antara kedua suku tersebut dengan adanya salah satu contoh stereotip bahwa jika ada satu individu yang memiliki 10 sapi, individu ini sudah dapat dipastikan sebagai seseorang dari suku Tutsi dan sebaliknya jika individu tersebut tidak memiliki 10 sapi maka diklasifikasikan sebagai suku Hutu. Sistem ini juga digunakan Belgia untuk menentukan suku etnis mana yang akan menempati posisi-posisi penting khususnya posisi-posisi di pemerintahan.

Ketegangan antara kedua suku tersebut akhirnya menyebabkan genosida terjadi di tahun 1990 dan selama periode 3 bulan di tahun 1994, dilaporkan sebanyak 800.000 jiwa dikabarkan menjadi korban dengan mayoritas korban jiwa merupakan suku Tutsi.<sup>5</sup> Diperkirakan sebanyak 1,75 juta jiwa menjadi korban jiwa atau melarikan diri ke negara-negara tetangga dan membentuk sebuah kelompok pemberontak yaitu *Rwanda Patriotic Front* (RPF).<sup>6</sup> Berbagai upaya untuk menyelesaikan perang sipil yang berakibat aksi genosida ini dilakukan, pada awal tahun 1990 Belgia menjadi negara pertama yang mengambil langkah untuk

---

<sup>4</sup> Crimes, A. E. W. Rwanda: The Preventable Genocide International panel of eminent personalities.

<sup>5</sup> Eriksson, J., Adelman, H., Borton, J., Christensen, H., Kumar, K., Suhrke, A., ... & Wohlgenuth, L. (1996). *The International Response to Conflict and Genocide: Lessons from the Rwanda Experience: Synthesis Report*. Joint Evaluation of Emergency Assistance to Rwanda.

<sup>6</sup> Batware, Billy. "Rwandan ethnic conflicts: a historical look at root causes." *European Peace University: Stadtschlaining, Austria* (2012).

berpartisipasi dalam menyelesaikan isu ini. Berkali-kali negosiasi dilakukan dengan gencatan senjata disetujui oleh berbagai pihak, yang akhirnya menghasilkan sebuah perjanjian perdamaian yang dinamakan *Arusha Accords* antara pemerintah dan RPF. PBB akhirnya bertugas untuk mengawasi implementasi dari *Arusha Accords*, namun dalam pelaksanaannya PBB gagal untuk memanfaatkan OAU serta negara-negara tetangga Rwanda di Afrika untuk menjadi representasi resmi dari *Arusha Accords*.<sup>7</sup>

*United Nation Assistance Mission For Rwanda* (UNAMIR) yang merupakan salah satu organisasi yang berada dalam *Arusha Accords* juga dinilai tidak efektif dengan sebagian besar merupakan tentara yang berasal dari Belgia. Fakta bahwa Belgia sebagai salah satu negara yang pernah menduduki Rwanda sebagai negara koloninya juga tidak membantu untuk proses di-eskalasi konflik, karena tentara Belgia menjadi salah satu target sasaran bagi pihak oposisi dan hanya berada di Rwanda selama sebulan. Mengetahui hal ini, pemerintah Belgia melalui Menteri Luar Negeri meminta PBB untuk mengirim tentara serta persenjataan lebih ke Rwanda, karena tentara Belgia tidak bisa melakukan apa-apa saat genosida terhadap suku Tutsi terus terjadi, namun PBB tidak menggubris hal ini. Dewan Keamanan PBB terlihat sejak awal tidak memberikan UNAMIR sumber daya yang diperlukan untuk mengendalikan konflik yang terjadi. Para ahli militer PBB memperkirakan sebanyak 5.000 sampai 8.000 tentara yang dibutuhkan di Rwanda,

---

<sup>7</sup> Erik Brattberg (2012) Revisiting UN Peacekeeping in Rwanda and Sierra Leone, *Peace Review: A Journal of Social Justice*, 24:2, 156-162

dan akhirnya hanya sebanyak 2.500 tentara yang dikirim oleh Dewan Keamanan PBB.<sup>8</sup>

Tentara UNAMIR pun tidak memiliki otoritas untuk melindungi warga sipil yang akhirnya dimanfaatkan oleh pihak oposisi untuk melanjutkan kekerasan. PBB dianggap lambat untuk menangani konflik yang terjadi yang mengakibatkan genosida sebanyak 800.000 jiwa terjadi dengan tentara yang dikirim hanya bisa menyaksikan tanpa bisa mengintervensi karena kurangnya sumber daya yang dibutuhkan. Komunitas internasional dianggap gagal untuk menangani konflik di Rwanda dengan genosida yang terus terjadi di hadapan PBB.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Genosida terhadap suku Tutsi di Rwanda yang kebanyakan dari mereka adalah warga sipil biasa, merupakan hasil dari perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh para pemimpin tinggi yang mempolitisasi etnis yang diikuti dengan penyimpangan dari kekerasan serta ketakutan.<sup>9</sup> Konflik di Rwanda tidak jauh dari sejarah, baik sejarah sebelum masa kolonial Jerman dan Belgia maupun masa pasca kolonial. Karakteristik dari kedua etnis mayoritas di Rwanda sangat dibedakan pada masa kolonial Belgia, dengan suku Tutsi yang diberi kesempatan untuk mendapatkan pendidikan serta pekerjaan yang lebih layak dibandingkan dengan suku Hutu. Hal-hal tersebut dipercaya telah menumbuhkan bibit-bibit konflik di

---

<sup>8</sup> Dallaire, R. A., and Bruce Poulin. *UNAMIR: Mission to Rwanda*. NATIONAL DEFENSE UNIV WASHINGTON DC CENTER FOR COUNTERPROLIFERATION RESEARCH, 1995.

<sup>9</sup> Newbury, Catharine. "Ethnicity and the Politics of History in Rwanda." *Africa Today* 45, no. 1 (1998): 7-24.

antara kedua belah pihak. Sampai akhirnya pada tahun 1959, tahun di mana suku Tutsi terakhir kali mendominasi dunia politik dan ekonomi Rwanda, sebuah kelompok revolusi Hutu mengambil alih kekuasaan tersebut.<sup>10</sup>

Kelompok revolusi ini mendorong sebagian besar dari suku Tutsi untuk melarikan diri ke negara-negara tetangga untuk menyelamatkan diri serta mencari perlindungan. Ketika perang sipil ini berada di puncaknya, pada tahun 1973 Mayor Jenderal Juvénal Habyarimana yang merupakan seorang dari suku Hutu, melalui kudeta militer berhasil mengambil alih kekuasaan di Rwanda. Di bawah kepemimpinannya praktik diskriminasi etnis sangat terlihat jelas dengan aturan “proporsi etnis” yang hanya memberikan kelompok suku Tutsi sebanyak 10% dari total sumber daya negara. Suku Tutsi yang melarikan diri ke Uganda membentuk sebuah pasukan bersenjata yang disebut *Rwanda Patriotic Front* (RPF) dan melancarkan serangan di perbatasan Uganda dan Rwanda pada Oktober 1990.<sup>11</sup> Peristiwa ini menjadi titik awal serangan genosida terhadap suku Tutsi, karena akibat serangan ini pemerintah yang memang memiliki propaganda yang sengaja digunakan untuk menjadi agenda pemerintah yaitu untuk menargetkan suku Tutsi yang masih berada di Rwanda.

Pemerintah secara kolektif menganggap seluruh suku Tutsi yang berada di Rwanda sebagai kaki tangan RPF dan berkhianat terhadap negaranya sendiri dengan menentang pihak yang berkuasa. Dari situ konflik antara kedua suku terus

---

<sup>10</sup> United Nations, Rwanda - UNAMIR Background, “*Historical Background*”, <https://peacekeeping.un.org/en/mission/past/unamirFT.htm> (diakses pada 22 September 2020)

<sup>11</sup> Eriksson, J., Adelman, H., Borton, J., Christensen, H., Kumar, K., Suhrke, A., ... & Wohlgemuth, L. (1996). *The International Response to Conflict and Genocide: Lessons from the Rwanda Experience: Synthesis Report*. Joint Evaluation of Emergency Assistance to Rwanda.

terjadi dengan Rwanda berada dalam kondisi politik anti Tutsi selama 3,5 tahun yang mengarah kepada genosida di tahun 1994.<sup>12</sup> Invasi RPF mendorong dunia internasional untuk mengambil langkah diplomasi untuk menyelesaikan konflik yang semakin memburuk. Selang beberapa hari pasca invasi, pemerintah Belgia merupakan salah satu negara pertama yang ikut serta dalam isu ini untuk dibawa ke Uni Eropa untuk meminta bantuan. Kegagalan komunitas internasional untuk turun tangan guna menghentikan genosida yang terjadi di Rwanda bukan tanpa alasan.

Sejumlah negosiasi gencatan senjata diupayakan, salah satunya adalah *Arusha Accords* yang di mana di dalam perjanjian tersebut dicantumkan izin untuk 50 anggota dari *Neutral Military Observer* (NMOG I) agar hadir di Rwanda bersama OAU.<sup>13</sup> *Arusha Accords* diharapkan dapat membawa kedamaian di Rwanda dengan menempatkan kekuatan internasional yang bersifat netral untuk mendemobilisasi kedua belah pihak yang berkonflik, serta melindungi komunitas ekspatriat. Penempatan kekuatan internasional yang bersifat netral ini merupakan salah satu bentuk implementasi dari *Arusha Accords* yaitu UNAMIR. Namun pada kenyataannya, mandat yang diberikan oleh DK PBB sangat membataskan ruang gerak UNAMIR untuk menghindari genosida terjadi. Selain itu, fakta di lapangan kala itu memperlihatkan bahwa UNAMIR tidak memiliki kekuatan yang sebenarnya diperlukan untuk mengurangi korban jiwa.

---

<sup>12</sup> Crimes, A. E. W. Rwanda: The Preventable Genocide International panel of eminent personalities.

<sup>13</sup> United Nations, Rwanda - UNAMIR Background, "*United Nations Involvement*", <https://peacekeeping.un.org/en/mission/past/unamirFT.htm> (diakses pada 15 September 2020)



Salah satu bukti bahwa DK PBB dari awal enggan untuk memberikan sumber daya yang UNAMIR sangat butuh kan untuk mengendalikan kondisi adalah kesepakatan akhir dari DK PBB yang hanya mengirimkan sebanyak 2.548 personil militer yang akan ditempatkan secara bertahap walaupun dengan masukan dari para ahli militer PBB untuk mengirimkan 5.000 sampai 8.800 pasukan.<sup>14</sup> Maka dari itu, UNAMIR sangat kekurangan baik dari segi sumber daya, pendanaan, pasukan untuk melakukan hal-hal yang seharusnya bisa dilakukan. Kegagalan dari *Arusha Accords* sendiri adalah tidak akan ada kesepakatan yang penting kecuali kesepakatan tersebut menghancurkan kekuatan suku Hutu di Rwanda. Analisis yang kurang tepat seperti saat DK PBB lebih memfokuskan mandat UNAMIR untuk mengakhiri perang saudara dan tidak untuk mencegah atau mengakhiri genosida. Banyak ahli menilai bahwa tanggapan dari dunia internasional yang diperlukan oleh Rwanda saat itu adalah kekuatan militer yang serius untuk mengurangi jumlah korban jiwa secara signifikan.

Alih-alih menanggapi permasalahan ini dengan tanggapan yang tepat dan serius, saat *the Belgian Blue Berets* atau tentara Belgia dibunuh, Belgia memutuskan untuk menarik tentara yang tersisa dari Rwanda. Inggris dan Amerika Serikat pun mulai bernegosiasi untuk menarik seluruh kekuatan UNAMIR dan menolak pengetahuan bahwa genosida besar-besaran tengah terjadi, dan akhirnya DK PBB hanya menyisakan sebanyak 270 tentara yang bertugas di Rwanda.<sup>15</sup> Di

---

<sup>14</sup> Erik Brattberg (2012) Revisiting UN Peacekeeping in Rwanda and Sierra Leone, *Peace Review: A Journal of Social Justice*, 24:2, 156-162

<sup>15</sup> Crimes, A. E. W. Rwanda: The Preventable Genocide International panel of eminent personalities.

sini terlihat bahwa sebenarnya komunitas internasional memilih untuk meninggalkan suku Tutsi di Rwanda, padahal kemungkinan untuk menyelamatkan ribuan suku Tutsi dari genosida memungkinkan bila mana ada 500 tentara jika saja Belgia dan PBB tidak mengambil keputusan tersebut. Potensi penuh UNAMIR tidak di fokus kan dan tidak terpakai yang sebagai akibatnya lebih banyak orang Rwanda yang menjadi korban jiwa.

### **1.2.1.Pembatasan Masalah**

Berangkat dari latar belakang serta identifikasi masalah yang telah dilampirkan sebelumnya, peneliti membatasi permasalahan ini dengan memperlihatkan bagaimana sekuritisasi terhadap komunitas di Rwanda dari tahun 1990-1994.

### **1.2.2 Perumusan Masalah**

Melihat besarnya konflik dari peristiwa genosida di Rwanda, keterlibatan yang dilakukan oleh komunitas internasional khususnya Belgia melalui United Nation Assistance Mission for Rwanda (UNAMIR) serta implikasi nya terhadap warga sipil, hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana proses dari resolusi konflik antara komunitas suku Tutsi dan Hutu di Rwanda. Maka kemudian penelitian ini akan dirumuskan ke dalam pertanyaan penelitian yakni: **“Bagaimana proses resolusi konflik antara komunitas suku Tutsi dan Hutu di Rwanda**

**dengan adanya intervensi Belgia melalui *United Nations Assistance Mission for Rwanda* (UNAMIR)?”**

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Penjabaran dari permasalahan sebelumnya, adapun tujuan dari penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah untuk menjabarkan bagaimana genosida di Rwanda disebabkan oleh berbagai faktor serta bagaimana proses resolusi konflik komunitas di Rwanda pasca adanya intervensi Belgia melalui United Nation Assistance Mission for Rwanda (UNAMIR) atas ancaman komunitas yang berupa genosida suku Tutsi yang menyebabkan ketidakstabilan politik regional sejak awal pecahnya konflik.

#### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan untuk mampu digunakan sebagai tambahan pengetahuan dan wawasan yang lebih luas mengenai studi hubungan internasional khususnya dalam studi keamanan non-tradisional dan konflik etnis di sebuah negara. Selain itu penulis memiliki harapan besar agar penelitian ini dapat diaplikasikan dengan konsep dan teori hubungan internasional lainnya untuk analisis dari studi kasus keamanan sejenis lainnya.

### **1.4 Kajian Literatur**

Kajian literatur yang akan dilampirkan dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan pandangan serta penjelasan atas tujuan dari penelitian ini guna penjabaran masalah bisa semakin efektif. Maka dari itu penulis akan mengkaji beberapa literatur yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, sebagai berikut:

**Melvern, Linda - *A People Betrayed: The Role of the West in Rwanda's Genocide***

Dalam literatur pertama milik Linda Melvern, Melvern mengkaji bagaimana genosida di Rwanda dapat terus terjadi tanpa hambatan yang disertai dengan sikap dari komunitas internasional yang acuh dan kegagalan pemerintah dan individu yang terlibat dalam mengintervensi dengan kecepatan dan skala yang dibutuhkan guna menghentikan kebrutalan di Rwanda. Di tahun di mana genosida terjadi pada 1994 silam, sikap acuh tak acuh terhadap apa yang terjadi di Rwanda terlihat jelas dengan pihak yang berkuasa secara internasional tidak melibatkan diri di tingkat yang paling mendasar seperti moral. Amerika Serikat, Inggris, Perancis, dan negara-negara anggota tetap DK PBB bermain politik, menolak pendanaan dan sepenuhnya menghindari kewajiban moral dan hukum internasional dari negara masing-masing. Peringatan dini yang jelas menyebabkan kelalaian dan sikap apatis dari komunitas internasional ini tidak bisa ditolerir dan akan tetap menjadi salah satu skandal internasional terbesar di abad ke-20. Genosida di Rwanda dan tanggapan komunitas internasional terhadap isu tersebut sangat bertolak belakang dengan prinsip PBB dan DK PBB yang seharusnya campur tangan dalam menghadapi pelanggaran HAM massal.

Selama rentan waktu tiga bulan saat genosida terjadi di Rwanda, tidak ada satu pun negara di barat yang memutuskan hubungan diplomatik dengan Rwanda. Selama rentan waktu itu pula genosida di Rwanda tetap terjadi karena tidak ada campur tangan dan gangguan dari dunia internasional. Pemerintah negara-negara yang merupakan anggota tetap DK PBB mengabaikan kewajiban dari Konvensi Genosida untuk mencegah kejahatan genosida dengan tidak melakukan intervensi yang dibutuhkan pada saat itu. Bapak dari Konvensi Genosida tahun 1948, pengacara berkewarganegaraan Polandia, Raphael Lemkin percaya bahwa ada suatu kebutuhan yang jelas dan mendadak untuk meninjau kembali hukum internasional untuk menghindari negara-negara yang berniat untuk memusnahkan orang berdasarkan identitas etnis mereka. Lemkin juga menambahkan bahwa menurutnya genosida merupakan sebuah aksi dari hasil sebuah rencana yang terkoordinasi yang sengaja diberlakukan kepada orang-orang yang menjadi korban hanya karena alasan sederhana, yaitu karena mereka merupakan anggota kelompok lain yang menjadi sasaran.

**Keller, E. J. - *Culture, politics and the transnationalization of ethnic conflict in Africa: new research imperatives***

Literatur yang kedua yang akan dikaji adalah literatur oleh Edmond Keller mengenai konflik etnis khususnya di Afrika. Konflik transnasional di Afrika salah satunya diawali dengan masalah dalam kebijakan dengan adanya kubu ideologis yang menghalangi representasi dari suatu kelompok berdasarkan identitas etnis atau agama yang berbeda. Identitas etnis merupakan akar dari masalah pluralisme di Afrika yang merupakan inti dari konflik etnis di Afrika. Konflik domestik di Afrika

lebih banyak terjadi jika dibandingkan dengan konflik antarnegara dalam beberapa tahun terakhir, namun keamanan regional dapat terancam jika konflik domestik ini semakin menegang. Konflik domestik dapat berubah menjadi konflik transnasional dikarenakan beberapa faktor seperti saat suatu kelompok etnis memiliki persepsi sendiri bahwa keamanan diri mereka terancam oleh suatu kelompok etnis lain dengan negara yang tidak bisa mengambil langkah yang tepat untuk mengamankan kondisi dari masyarakatnya dengan menengahi antara dua kelompok etnis tersebut.

Kelompok etnis yang merasa terancam akan menjadi kelompok yang paling tidak siap jika mendapat serangan dan cenderung memilih untuk menyelamatkan diri ke negara tetangga. Hal ini terjadi saat suku Tutsi merasa terancam oleh kemungkinan akan apa yang akan terjadi pada mereka jika suku Hutu berhasil untuk mengambil alih kekuasaan di Rwanda. Faktor lain yang bisa mengubah konflik domestik menjadi konflik transnasional adalah sejarah antara kelompok etnis yang berseteru. Misalnya, suku Tutsi merasa terancam oleh kemungkinan-kemungkinan terburuk yang mungkin akan dilakukan oleh suku Hutu terhadap mereka, saat mengingat kembali hal-hal yang terjadi pada suku mereka di tangan pemerintahan suku Hutu. Dan sebaliknya, suku Hutu mengingat kembali bagaimana mereka pernah dieksploitasi dan didominasi oleh suku Tutsi selama masa kolonial Belgia.

**Erik Brattberg - *Revisiting UN Peacekeeping in Rwanda and Sierra Leone*,  
*Peace Review: A Journal of Social Justice***

Literatur yang ditulis oleh Erik Brattberg menjelaskan faktor-faktor yang berkontribusi atas keberhasilan misi penjaga perdamaian dengan membandingkan dua misi PBB yang memiliki karakteristik perang sipil yang kurang lebih sama

namun dengan hasil yang berbeda, UNAMIR di Rwanda dan UNAMSIL di Sierra Leone. Brattberg berpendapat bahwa alasan utama mengapa salah satu misi berakhir dengan kesuksesan (Sierra Leone) sementara misi yang lain menjadi salah satu kegagalan terbesar dalam sejarah misi perdamaian PBB (Rwanda) adalah kesediaan DK PBB untuk menyesuaikan sumber daya yang sesuai dengan kondisi di lapangan. Literatur ini juga ingin membuktikan argumen bahwa misi perdamaian internasional akan berakhir dengan kegagalan jika misi tersebut merupakan konflik perang sipil yang rumit. Rwanda mendapatkan kemerdekaannya pada tahun 1962 dengan rezim baru yang mayoritas suku Hutu yang dengan sengaja mengecualikan suku Tutsi untuk berkuasa. Konflik pecah 30 tahun kemudian saat *Rwandan Patriotic Front* (RPF) yang didominasi oleh suku Tutsi melancarkan serangan terhadap pemerintahan suku Hutu.

Misi PBB ke Rwanda yaitu UNAMIR merupakan salah satu implementasi dari *Arusha Agreement* yang didirikan oleh DK PBB. Menurut Perjanjian Arusha, UNAMIR bertugas untuk menjamin keamanan secara keseluruhan di Rwanda, namun mandat dari DK PBB sangat membatasi UNAMIR dengan hanya memberi izin untuk berkontribusi atas keamanan di ibukota Kigali. Hal tersebut menyebabkan UNAMIR tidak bisa menggunakan kekuatan mereka untuk menghadapi kekerasan yang tengah terjadi di sekitarnya selain untuk mempertahankan diri karena tidak memiliki izin dari DK PBB. Sejak awal, DK PBB terbukti enggan untuk memberikan UNAMIR sumber daya yang dibutuhkan untuk mengendalikan situasi agar lebih kondusif. Pada akhirnya hanya sekitar 2.548

tentara yang diposisikan di Rwanda, meskipun para ahli militer di PBB telah memperkirakan antara 5.000 dan 8.000 pasukan yang akan diperlukan.

Berdasarkan pada ketiga kajian literatur di atas, masing-masing dari ketiga literatur telah memberikan pemahaman-pemahaman khusus yang lebih mendalam mengenai apa yang terjadi di Rwanda. Melihat adanya persamaan pada literatur pertama dan terakhir, maka penelitian akan berkontribusi pada artikel jurnal pertama dan terakhir dengan menambahkan argumentasi terkait cara aktor internasional mengenai kasus genosida dengan pembedanya pada penekanan peran Belgia melalui UNAMIR.

### **1.5 Kerangka Pemikiran**

Pertanyaan penelitian yang hendak dijawab melalui penelitian ini yaitu bagaimana proses resolusi konflik antara komunitas di Rwanda dengan adanya intervensi Belgia melalui *United Nations Assistance Mission for Rwanda* (UNAMIR), akan menggunakan salah satu pendekatan yaitu resolusi konflik oleh Peter Wallensteen.

Perjanjian perdamaian sangat populer pasca Perang Dingin dengan adanya beberapa yang berhasil mengubah konflik menjadi hubungan yang lebih baik antara negara dengan masyarakatnya dan ada beberapa yang tidak berhasil dan hanya menjadi perjanjian yang tidak memiliki dampak apa-apa terhadap masyarakat yang terancam seperti kasus suku Tutsi di Rwanda ini. Negosiasi merupakan salah satu bentuk dari resolusi konflik dan pada awal tahun 90an sering digunakan dalam politik dalam negeri untuk mencapai suatu kesepakatan. Negosiasi juga memiliki



tujuan untuk mengontrol persenjataan dalam suatu perang yang memiliki tujuan lebih lanjut untuk mengurangi resiko perang. Resolusi konflik berasal dari penelitian mengenai perdamaian yang menarik kesimpulan atas penyebab perang, isu mengenai persenjataan dan dinamika dari konflik itu sendiri.<sup>16</sup> Resolusi konflik bertujuan menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang relatif dapat bertahan lama di antara kelompok-kelompok yang bermusuhan.

Resolusi konflik difokuskan pada sumber konflik yang terjadi antara dua pihak untuk bersama-sama mengidentifikasi isu-isu yang menjadi sumber permasalahan. Menurut Peter Wallensteen, definisi resolusi konflik mengandung tiga unsur penting, yaitu adanya kesepakatan yang biasanya dituangkan dalam sebuah dokumen resmi yang ditandatangani dan menjadi pegangan selanjutnya bagi semua pihak. Kesepakatan juga dapat dilakukan secara rahasia atas permintaan pihak-pihak yang bertikai dengan pertimbangan tertentu yang sifatnya sangat subyektif. Lalu setiap pihak menerima atau mengakui eksistensi dari pihak lain sebagai subyek. Sikap ini sangat penting karena tanpa itu mereka tidak dapat bekerjasama selanjutnya untuk menyelesaikan konflik secara tuntas, serta pihak-pihak yang bertikai juga sepakat untuk menghentikan segala aksi kekerasan sehingga proses pembangunan rasa saling percaya bisa berjalan sebagai landasan untuk transformasi sosial, ekonomi dan politik yang didambakan.

Konsep konflik internal menurut Brown adalah perselisihan politik atau sengketa yang berpotensi meningkat dan menimbulkan kekerasan berkelanjutan

---

<sup>16</sup> Wallensteen, Peter. *Understanding conflict resolution*. Sage, 2018.

yang berasal dari isu domestik dengan ancaman konflik terjadi di perbatasan negara.<sup>17</sup> Konflik internal seperti konflik etnis bersenjata sering kali mengenai seputar perebutan kekuasaan antara warga sipil dan pemimpin militer dengan aktor utama antara pemerintah dan kelompok pemberontak. Dalam konflik internal juga ada tiga isu penting: penyebab, dimensi regional, dan upaya internasional untuk menangani masalah yang ditimbulkan oleh konflik internal. Dalam menjelaskan sumber penyebab dari konflik internal, Brown mengemukakan faktor-faktor penyebab. Faktor pertama yaitu faktor struktural yang fokus dalam tiga aspek penting lainnya, sistem negara yang lemah, masalah keamanan dalam negara, serta penyebaran etnis dalam suatu wilayah.<sup>18</sup>

Banyak negara di Afrika terlahir lemah yang dikarenakan negara-negara tersebut terbentuk dari kerajaan kolonial yang tidak memiliki legitimasi politik serta lembaga politik yang mampu menjalankan kontrol yang dibutuhkan atas wilayah negaranya.<sup>19</sup> Selain diawali dengan sistem negara yang sudah lemah, beberapa negara di Afrika tidak mampu untuk mendorong akan adanya pembangunan ekonomi yang mengancam keamanan dalam negara dengan adanya tindak kekerasan yang diakibatkan masalah ekonomi dan perebutan kekuasaan antara pemimpin kelompok suku etnis mayoritas. Kelompok etnis minoritas sangat rentan terhadap konflik karena dalam banyak kasus kelompok mayoritas akan berusaha untuk merebut kontrol atas suatu wilayah yang akan berpotensi menyebabkan serangan langsung terhadap warga sipil, *ethnic cleansing*, dan genosida seperti yang

---

<sup>17</sup> Brown, Michael Edward. *The international dimensions of internal conflict*. No. 10. Mit Press, 1996.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm 13

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm 13

terjadi di Rwanda.<sup>20</sup> Faktor selanjutnya yaitu faktor politik. Institusi politik yang diskriminatif, ideologi nasional yang eksklusif, politik antar kelompok, dan elite politik merupakan empat faktor politik utama yang penting dalam konflik internal.<sup>21</sup> Faktor ekonomi mengenai sistem ekonomi yang diskriminatif serta permasalahan dalam pembangunan ekonomi juga faktor yang mempengaruhi adanya konflik internal.

Terakhir, faktor budaya yang berfokuskan pada sejarah diskriminasi dalam budaya. Konflik internal penting untuk dikaji karena konflik internal memiliki potensi untuk menyebar luas dan melibatkan negara tetangga karena terjadi di perbatasan negara. Konflik internal saat ini merupakan bentuk konflik bersenjata yang paling meluas dalam sistem internasional. Karena bentuk konfliknya yang mudah untuk meluas, konflik internal juga menyebabkan penderitaan yang luar biasa karena konflik internal sering kali melibatkan serangan langsung dengan warga sipil menjadi korban jiwa. Total jumlah orang yang menjadi pengungsi atau terbunuh dalam konflik internal sering kali mencapai puluhan bahkan ratusan ribu dan terkadang jutaan.

Dalam kasus paling ekstrem seperti di Rwanda pada tahun 1994, genosida dilakukan. Selain korban jiwa, masalah pengungsi yang sering melarikan diri dan melintasi perbatasan internasional ke negara tetangga juga menjadi salah satu alasan konflik internal penting untuk dikaji. Dengan jumlah yang tidak sedikit, seperti pada saat puncak pembantaian suku Tutsi di Rwanda pada tahun 1994,

---

<sup>20</sup> Ibid., hlm 15

<sup>21</sup> Ibid., hlm 16

sebanyak 250.000 orang melarikan diri ke Tanzania dalam satu hari saja, lalu selama beberapa bulan setelahnya sebanyak 2 juta orang mengungsi ke negara-negara tetangga seperti Tanzania, Zaire, dan Burundi. Hal ini bisa merusak stabilitas regional karena tidak ada satu pun dari negara tersebut yang mampu menyediakan kebutuhan yang memadai dari para pengungsi tersebut. Belum lagi banyak dari negara tersebut bertanggung jawab sebagai pemicu konflik internal yang dalam banyak kasus, ikut campur dalam konflik yang sedang berlangsung dan memperburuk situasi yang sudah buruk.

Pendekatan *human security* atau keamanan manusia pertama kali dibahas di dalam *Human Development Report* (HDR) global pada 1994, kemudian PBB mengadopsi definisi umum dari keamanan manusia pada sidang umum PBB pada 2012 silam.<sup>22</sup> Pendekatan keamanan manusia secara tidak langsung memperluas cakupan dari analisis mengenai keamanan dan kebijakan itu sendiri. PBB menekankan bahwa negara-negara anggota memiliki peran penting dalam mengidentifikasi serta menangani tantangan-tantangan yang mengancam kelangsungan hidup rakyat dari masing-masing. Dengan kata lain, keamanan manusia adalah ancaman-ancaman yang mengancam nilai-nilai penting yang berkaitan dengan kehidupan rakyat. Ada dua komponen utama dalam keamanan manusia, yang pertama adalah kebebasan dari rasa takut (*freedom from fear*) dan kebebasan dari keinginan (*freedom from want*).

---

<sup>22</sup> UN General Assembly, 66th Session “Follow-up to paragraph 143 on human security of the 2005 World Summit Outcome” (A/RES/66/290), 25 October 2012.

Kedua komponen tersebut merupakan bagian dari empat kebebasan manusia yaitu, kebebasan berbicara dan berekspresi, kebebasan beribadah, kebebasan dari rasa takut dan kebebasan dari keinginan.<sup>23</sup> Definisi dari keamanan manusia yang lebih luas yang tertera pada HDR di tahun 1994, yang menyebutkan bahwa peralihan fokus keamanan dari cara militer guna melindungi negara serta perbatasannya ke perlindungan di level individu dari ancaman yang lebih luas terhadap kesejahteraan dan keamanan rakyat. Inti dari pendekatan ini adalah sebuah gagasan yang di mana hak seseorang untuk memiliki hak untuk hidup dalam kebebasan dengan martabat, bebas dari kemiskinan dengan kesempatan yang sama untuk menikmati hak sebagai manusia.<sup>24</sup> HDR 1994 mendefinisikan keamanan manusia sebagai bentuk keamanan dari bentuk-bentuk ancaman seperti, kelaparan, penyakit, penindasan, dan gangguan yang mengganggu pola kehidupan sehari-hari di komunitas. Keamanan komunitas menurut HDR 1994 adalah satu dari tujuh dimensi dalam keamanan manusia.

Definisi dari keamanan komunitas itu sendiri adalah suatu pendekatan yang berpusat pada individu untuk mengatasi ancaman lain yang memiliki keterkaitan dengan keamanan manusia serta pembangunan negara. Keamanan komunitas menciptakan kurangnya kepercayaan antara individu di dalam sebuah komunitas yang dapat mempengaruhi perkembangan ekonomi dan pembangunan dalam sebuah negara.<sup>25</sup> Maka dari itu, keamanan komunitas memiliki kontribusi sebagai

---

<sup>23</sup> Franklin Delano Roosevelt's address to the United States Congress, January 6 1941, chapter 36.

<sup>24</sup> UN General Assembly, 66th Session "Follow-up to paragraph 143 on human security of the 2005 World Summit Outcome" (A/RES/66/290). 25 October 2012

<sup>25</sup> UNDP, Community Security, <https://www.undp.org/content/undp/en/home/2030-agenda-for-sustainable-development/peace/rule-of-law--justice--security-and-human-rights/community-security.html>

salah satu solusi jangka panjang dalam penyelesaian isu keamanan. Ancaman yang dihadapi oleh sebuah komunitas bisa beragam, mulai dari masalah kemiskinan, pengangguran, aksi-aksi kejahatan, dan pengasingan sosial yang memiliki potensi menjadi awal dari adanya konflik kekerasan. Dengan mengidentifikasi serta menangani sumber-sumber dari ancaman tersebut, keamanan komunitas dapat menghubungkan keamanan, perdamaian, dan pembangunan sebagai suatu rangkaian yang saling memperkuat dari suatu pendekatan.<sup>26</sup>

Keterkaitan keamanan manusia yang dalam penelitian ini berfokus pada salah satu dari ketujuh dimensi dari keamanan manusia menurut UNDP yaitu komunitas dengan ancaman dalam kasus Rwanda yakni genosida. Genosida dalam penelitian ini di analisa sebagai suatu ancaman. Konsep genosida ini menurut *Genocide Convention* yang merupakan draf hasil dari sebuah konvensi yang dihadiri oleh para negara anggota PBB pada tahun 1948 tertulis pada Pasal II adalah sebagai berikut

Dalam Konvensi ini, genosida berarti salah satu dari tindakan berikut yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan, secara keseluruhan atau sebagian, kelompok nasional, etnis, ras atau agama, seperti:

1. Membunuh anggota kelompok;
2. Menyebabkan cedera fisik atau mental yang serius pada anggota kelompok;

---

<sup>26</sup> Bennett, Will. *Community Security Handbook*. Saferworld, 2014.

3. Dengan sengaja menimbulkan kondisi kehidupan kelompok yang diperhitungkan akan menyebabkan kehancuran fisiknya secara keseluruhan atau sebagian;
4. Memaksakan tindakan yang dimaksudkan untuk mencegah kelahiran dalam kelompok;
5. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok ke kelompok lain.<sup>27</sup>

## **1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data**

### **1.6.1 Metode Penelitian**

Metode penelitian yang akan digunakan untuk meneliti dan menjawab pertanyaan penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, yang menekankan pada penggunaan konsep dan definisi.<sup>28</sup> Melalui metode penelitian ini, pentingnya akan pemahaman secara deskriptif mengenai konteks sosial, politik, dan budaya dapat dipahami lebih mendalam.<sup>29</sup> Keterlibatan subjek peneliti dalam proses pengumpulan data juga merupakan suatu fenomena sosial yang dapat dikaji menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif berfokus pada fakta, analisis data, dan teori yang akan digunakan sebagai acuan atau referensi

---

<sup>27</sup> United Nations, Office on Genocide Prevention and the Responsibility to Protect, "Genocidie", Background, <https://www.un.org/en/genocideprevention/genocide.shtml>

<sup>28</sup> Lune, Howard, and Bruce L. Berg. "Qualitative research methods for the social sciences." (2017).

<sup>29</sup> Chih-Pei, H. U., and Yan-Yi CHANG. "John W. Creswell, research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches." *Journal of Social and Administrative Sciences* 4, no. 2 (2017): 205-207.

dalam meneliti penelitian ini lebih lanjut dan membuktikan kepentingan terhadap dibuatnya penelitian ini.<sup>30</sup>

### **1.6.2 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam pengumpulan data untuk kepentingan dalam melakukan penelitian deskriptif ini, peneliti menggunakan teknik studi kepustakaan. Data pustaka tersebut dapat berdasarkan buku, jurnal, historis, artikel berita elektronik, publikasi elektronik organisasi internasional, dan dokumen resmi negara. Sumber-sumber tersebut berbentuk secara fisik maupun elektronik melalui internet yang di mana data-data yang telah diperoleh akan digunakan, diinterpretasikan, dan di analisa lebih dalam untuk menjadi dasar dari analisis penelitian ini.

### **1.7 Sistematika Pembahasan**

Sistematika dari penulisan penelitian ini akan dibagi menjadi beberapa bagian pembahasan yaitu empat bab agar penelitian dapat diuraikan dengan jelas dan mendalam sebagai berikut:

Bab I merupakan bagian pendahuluan dari rancangan penelitian yang terdiri atas latar belakang serta identifikasi dari masalah konflik etnis di Rwanda, dilanjutkan dengan pembatasan serta perumusan masalah yang menjadi rancangan dasar dari penelitian ini. Penjelasan kemudian dilanjutkan dengan menjabarkan

---

<sup>30</sup> Ibid.



tujuan serta kegunaan penelitian, kajian literatur, kerangka pemikiran yang akan membantu dalam proses analisis, dan terakhir metode penelitian, teknik pengumpulan data dan sistematika pembahasan yang akan memperjelas penelitian ini lebih lanjut.

Bab II merupakan bagian lanjutan dari penelitian ini dengan akan dilampirkannya data dan informasi yang akan menunjang analisis serta menjadi dasar dari pemahaman dalam memandang konflik etnis di Rwanda yang akan dibagi menjadi sub-bab sebagai berikut:

## BAB 2: Gambaran Umum Konflik Antar Etnis Di Rwanda Yang Berujung Pada Aksi Genosida

2.1 Komunitas yang bersengketa antara suku Hutu dan Tutsi di Rwanda

2.2 Konflik internal antara suku Hutu dan Tutsi

2.3 Eskalasi konflik antar suku Hutu dan Tutsi

2.4 Keterlibatan RPF sebagai kelompok pemberontak di Rwanda yang mengancam komunitas di Rwanda

Bab III merupakan bagian analisis yang akan menjawab pertanyaan penelitian dengan mengaitkan dengan kerangka pemikiran yang akan dibagi menjadi sub-bab sebagai berikut:

## BAB 3: Proses Resolusi Konflik Oleh Pemerintah Rwanda Tahun 1990-1994

3.1 *Arusha Accords* Sebagai Resolusi Perdamaian Untuk Mengakhiri Genosida

3.2 Mandat DK PBB Berupa Implementasi UNAMIR Dalam Menjalankan Misi Perdamaian di Rwanda

Bab IV merupakan bagian penutup dari penelitian ini dengan penulis akan melakukan rekapan ulang atas semua data yang telah didapatkan dalam penelitian ini serta penarikan kesimpulan dari analisis dengan menggunakan teori, konsep, dan data.